



**RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

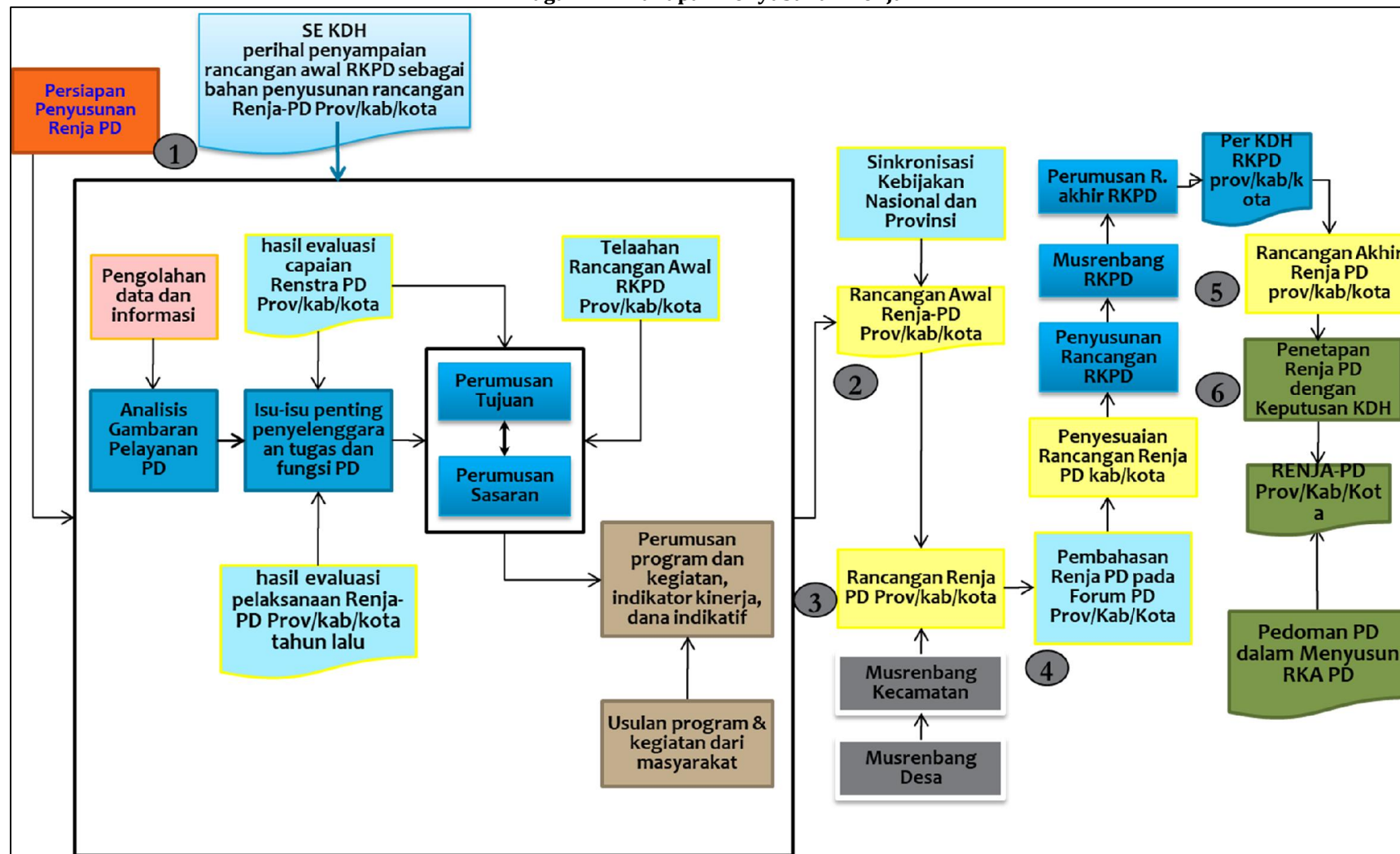
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2021.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastuktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2018 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2013-2018

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Anggaran Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 20.951.107.771,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.594.419.256,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.356.688.515,00. Dengan total realisasi sebesar Rp. 19.998.162.849,00 (95,45%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.348.629.333,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 13.649.533.516,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 13 program dan 44 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

No	Uraian		Alokasi Biaya			Output/Keluaran					
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Uraian	Target	Realisasi	%		
A	PENGHASILAN ASLI DAERAH										
1	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN		142.092.000	116.826.000	82						
	1.	Toko/Ruko	12.600.000	11.703.000	93	toko/Ruko penarikan sebesar Rp3000	350	buah /bln	330	buah /bln	94,2857
	2	Toserba/Swalayan /Supermarket	5.280.000	4.940.000	94	Toserba/Swalayan/Supermarket Rp20.000	22	buah /bln	21	buah /bln	95,4545
	3	Hotel	540.000	465.000	86	Hotel sebesar Rp15.000	3	buah /bln	2	buah /bln	66,6667
	4	Rumah Makan Kelas II	900.000	630.000	70	Rumah Makan Kelas II Rp 15.000	5	buah /bln	4	buah /bln	80
	5	Rumah Makan Kelas III	3.000.000	2.445.000	82	Rumah Makan Kelas III Rp.5.000	50	buah /bln	42	buah /bln	84
	6	Warung Makan	1.200.000	817.500	68	Warung Makan Rp.2.500	40	buah /bln	35	buah /bln	87,5
	7	Bengkel/Cuci mobil (Besar)	1.200.000	840.000	70	Bengkel/Cuci mobil (Besar) Rp.20.000	5	buah /bln	3	buah /bln	60
	8	bengkel/Cuci mobil (Kecil)	4.500.000	2.745.000	61	bengkel/Cuci mobil (Kecil) Rp.15.000	25	buah /bln	16	buah /bln	64
	9	Perusahaan Industri (Menengah)	1.200.000	1.000.000	83	Perusahaan Industri (Menengah) Rp.50.000	2	buah /bln	1	buah /bln	50
	10	Perusahaan Industri (Kecil)	900.000	600.000	67	Perusahaan Industri (Kecil) Rp.15.000	5	buah /bln	4	buah /bln	80
	11	Industri Rumah Tangga	4.200.000	2.610.000	62	Industri Rumah Tangga Rp.5.000	70	buah /bln	50	buah /bln	71,4286
	12	Pelayanan Kesehatan	2.700.000	1.680.000	62	Pelayanan Kesehatan Rp. 15.000	15	buah /bln	10	buah /bln	66,6667

	13	Tempat Usaha Kios	450.000	302.500	67	Tempat Usaha Kios Rp.2.500	15	buah /bln	12	buah /bln	80
	14	Pedagang Kaki Lima Kab Sampang	8.570.000	7.905.000	92	Pedagang Kaki Lima Rp 1000	715	buah /bln	675	buah /bln	94,4056
	16	PDAM :									
		Rumah Tangga	68.352.000	59.418.000	87	Rumah Tangga Rp 2.000	2848	buah /bln	2476	bln	86,9382
		Dinas/Kantor	25.500.000	18.325.000	72	Dinas/Kantor Rp25.000	85	buah /bln	61	bln	71,7647
	16	Pasar Se- Kab. Sampang	1.000.000	400.000	40	Pasar Se-Kab. Sampang	83	buah /bln	34	buah /bln	40,9639
2	RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS		9.000.000	9.000.000	100						
	1	Ret.Penyediaan/Pe nyedotan WC	9.000.000	9.000.000	100		60	kali peny edota n	60	kali peny edota n	100
	Jumlah		151.092.000	125.826.000	83						
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG		6.594.419.256	6.348.629.333	96	Gaji pegawai	14	bulan	14	bulan	100
II	BELANJA LANGSUNG		14.356.688.515	13.649.533.516	95						
III	SASARAN										
	Meningkatnya kualitas pengelolaan LH		11.999.034.015	11.323.395.167	94						
A	Program dan Kegiatan pada semua SKPD		2.357.654.500	2.326.138.349	99						
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		756.218.500	739.609.739	98	Persentase pemenuhan kebutuhan adminis perkantor	100	%	100	%	100
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	7.199.400	96	Jumlah surat terkirim	900	surat	900	surat	100
	2	Penyed. Js. Kom. Sbr daya air & listrik	64.080.000	58.250.221	91	Biaya tagihan listrik, tlp, air	3	maca m/bl n	3	maca m/bln	100
	3	Penyed. Js. Pemel. & Perij. Kend. Dinas/ops	45.100.000	41.191.800	91	Biaya pemel. & perijinan kend.ops	75	kend.	63	kend.	84
	4	Penyed. Jasa kebersihan kantor	49.991.600	46.076.100	92	Tersed. peral & bahan pembersih	650	bh	650	bh	100
	5	Penyed. ATK	43.889.400	43.880.000	100	Kebutuhan ATK	58	maca m	58	maca m	100
	6	Penyed. Barang cetakan &	50.000.000	49.832.575	100	Keb. cetak, dan foto	18	jenis	18	jenis	100

		penggandaan				copy rutin					
7		Penyed. Komp. Ins. Listrik/pener. Bangunan	25.250.000	25.248.100	100	Peralatan listrik kantor	18	macam	18	macam	100
8		Penyed. Bahan bacaan & perundangan	3.600.000	3.580.000	99	Biaya langganan koran	720	surat kabar	720	surat kabar	100
9		Penyed. Makanan & Minuman	82.200.000	80.501.000	98	Mamin untuk rapat dan tamu	3300	OK	3300	OK	100
10		Rapat2 Koord & Konsul. Ke luar daerah	236.117.500	235.385.543	100	Perjalanan dinas luar daerah	103	OK	103	OK	100
11		Penyed. Js. Ten. Pend. Adm/Tek. Perkan.	140.000.000	140.000.000	100	Honor tenaga kontrak	10	org	10	org	100
12		Rapat2 Koord & Konsul. Ke dalam daerah	8.490.000	8.465.000	100	Perjalanan dinas dalam daerah	12	kecamatan	12	kecamatan	100
2		Prog. Peningk. Sarana & Prasarana Aparatur	1.327.566.000	1.318.496.895	99	Persentase sarana dan prasarana aparatur dlm kondisi baik	100	%	100	%	100
1		pengadaan meubelair	48.250.000	47.815.000	99	meubelair kantor terpenuhi	34	unit	34	unit	100
2		pengadaan komputer	72.250.000	71.950.000	100	komputer untuk kerja terpenuhi	7	unit	7	unit	100
3		Pengadaan Peralatan Kantor	22.650.000	20.816.050	92	Pengad. Perlengk. Kantor, Umbul2 dll	83	bh	83	bh	100
4		Pengadaan Perlengkapan Kantor	52.250.000	51.050.000	98	Pengad. Peralatan kantor	3	macam	3	macam	100
5		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	255.600.000	251.250.000	98	Pemeliharaan gedung kantor	662	m2	662	m2	100
6		Pemeliharaan rutin/berkala kend. Dinas ops	848.516.000	847.593.845	100	Terpeliharaan ya kend. Dinas ops.	60	kend	60	kend	100
7		Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	3.000.000	3.000.000	100	Pemeliharaan Meubelair kantor	27	unit	27	unit	100
8		Pemel. Rutin/berkala peralat. & Perlengk. Kantor	25.050.000	25.022.000	100	Pemel. Peralat.&Perlg. Kantor	41	unit	41	unit	100
3		Program Peningk.	153.125.000	150.762.500	98	persentase	100	%	100	%	100

Disiplin Aparatur					tingkat kedisiplinan aparatur					
1	Pengad. Pakaian Kerja lapangan	153.125.000	150.762.500	98	Pakaian Kerja Lapangan	250	stel	250	stel	100
4	Prog. Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparat	92.525.000	89.131.715	96	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	%	100	%	100
1	Pendidikan dan pelatihan formal	92.525.000	89.131.715	96	Peningkatan SDM yang Berpotensi	14	Org	14	Org	100
5	Prog. Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.220.000	28.137.500	100	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat	100	%	100	%	100
1	Peyus. Lap. Cap. Kin & ikh real kinerja SKPD	12.215.000	12.205.000	100	Laporan LAKIP	2	doku men	2	doku men	100
2	Penyus. Lap. Keuangan semesteran	3.105.000	3.105.000	100	Laporan Keuangan semesteran	2	doku men	2	doku men	100
3	Penyus. Lap. Keuangan Akhir Tahun	2.900.000	2.870.000	99	Laporan Keuangan akhir tahun	1	doku men	1	doku men	100
4	Penyus. RKA SKPD & DPA SKPD	10.000.000	9.957.500	100	DPA & RKA	2	doku men	2	doku men	100
B	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	11.999.034.015	11.323.395.167	94						
1	Prog. Penataan dan Pengkajian LH	58.100.000	49.120.000	85						
1	Pengawasan pelaks kebijakan bidang LH	58.100.000	49.120.000	85						
1	Prog. Pengemb. Kinerja Pengel. Persampahan	7.469.794.400	7.107.869.488	95	Persentase penanganan persampahan	91,55	%	91,55	%	100
					Jumlah tenaga pelopor lingkungan	42	orang	42	orang	100
1	Penyed. Pras & sar pengel.	3.014.345.80	2.951.508.80	98	Sar & Pras persampaha	16755	unit	16755	unit	100

		Persampahan	0	0		n utk 1 th					
	2	Peningk. Ops & pemel. Pras & sar persamp.	3.131.772.000	2.967.614.700	95	Pemel. Sar & pras persampahan	60	unit	60	paket	100
	3	Peningk. PSM dlm Pengel. Persampahan	250.281.000	239.531.000	96	Sosialisai kader	6	Kelurahan	6	Kelurahan	100
	4	Peningk. TPA	1.073.395.600	949.214.988	88	Perbaikan Mutu & Kualitas TPA	10	pekerjaan	10	pekerjaan	100
2	Prog. Peningkatan Pengendalian Polusi		135.970.000	112.860.000	83	Status mutu air sungai (%)	100	%	100	%	100
	1	Pengujian kadar polusi limbah padat&cair	53.740.000	44.785.000	83	Analisa air limbah	40	sampel	40	sampel	100
	2	Penyuluhan & pengend. Polusi & pencemaran	82.230.000	68.075.000	83	Penyuluhan pencemaran polusi	3	kecamatan	3	kecamatan	100
3	Prog. Peningk. Kualitas & Akses Informasi SDA		593.618.600	587.923.200	99	Jumlah dokumen informasi SDA dan LH	1	dokumen	1	dokumen	100
	1	Peningkt. Edukasi&Kom. Masy. Di bid. Lingk.	572.418.600	567.813.200	99	Edukasi dan komunikasi masy. Melalui media massa	4	sekolah adiwiyata	4	sekolah adiwiyata	100
	2	Pengembangan Data & Informasi Lngk.	21.200.000	20.110.000	95	Penyusunan SLHD	1	dokumen	1	dokumen	100
4	Prog. Pengend. Pencemaran & Perusakan LH		1.076.705.000	850.612.189	79	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif teknis pencegahan pencemar air	100	%	100	%	100
	1	Koord. Penilaian Kota Sehat/Adipura	398.055.000	310.754.454	78	Koordinasi pelaksanaan Adipura	16	kali	16	kali	100
	2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	503.925.000	378.107.735	75	Analisa kualitas air sungai	20	sampel	19	sampel	95
	3	Pengkajian			92	Pengawasan	64	usaha	64	usaha	100

		Dampak Lingkungan	69.800.000	64.125.000		Dampak Lingk.					
	4	peningk. PSM dlm Pengendalian LH	104.925.000	97.625.000	93	Kampanye pentingnya LH	1	even	1	even	100
5	Prog. Perlindungan & Konservasi SDA		312.531.900	304.799.500	98	Penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Ha)	3,5	ha	3,5	Ha	100
						Persentase rehabilitasi lahan kritis	38,29	ha	38,29	Ha	100
	1	Konserv. SDA & pengend. Kerusakan SDA	312.531.900	304.799.500	98	Penanaman pohon	2000	btg	2000	btg	100
6	Prog. Pengelolaan RTH		1.681.023.359	1.641.187.540	98	Luas RTH	1.392	ha	1.392	ha	100
	1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	94.351.569	93.730.640	99	Penanaman pohon Jalur Hijau	2	Lokasi	2	Lokasi	100
	2	Pemeliharaan RTH	1.356.844.790	1.320.157.900	97	Pemeliharaan Pertamanan	1,932	Ha	1,932	Ha	100
	3	Peningkt. PSM dlm Pengelolaan RTH	229.827.000	227.299.000	99	PSMdalm pengelolaan RTH	1	Kec. Spg	1	Kec. Spg	100
7	Prog. Dekorasi Kota		671.290.756	669.023.250	100	Cakupan pemeliharaan dekorasi kota	20	titik	19	titik	95
	1	Pemeliharaan Dekoratif Kota	671.290.756	669.023.250	100	Pemeliharaan Dekorasi Kota	19	Lokasi	19	Lokasi	100
		JUMLAH (I + II)	20.951.107.771	19.998.162.849	95						

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 95,89% atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah di tetetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh

mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 memuat 10 program dan 34 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2019-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d. Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	
2.05	LINGKUNGAN HIDUP								15.067.592.146		15.067.592.146		100,00		15.067.592.146				
2.05.15.	Program Penataan dan pengendalian lingkungan hidup	1	Persentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan	%	100,00	9.138.356.260			100,00	1.343.498.000	100,00	1.343.498.000	100,00	100,00	100,00	1.343.498.000	100,00	14,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	%															
2.05.16.	Program Kebersihan dan Persampahan	1	Persentase penurunan timbulan sampah	%	30,00	54.725.136.090			20,00	8.045.550.950	20,00	8.045.550.950	100,00	100,00	20,00	8.045.550.950	66,67	14,70	
2.05.17.	Program konservasi, rehabilitasilingkungan dan pertamanan	1	penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	ha.	7,00	24.885.944.875			4,50	3.479.307.296	4,50	3.479.307.296	100,00	100,00	4,50	3.479.307.296	64,29	13,98	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2019-2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3		4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12
		2	Persentase luas RTH perkotaan	%	14,00	.			10,00		0,80		8,00		0,80		5,71		
1.00.01.	Program pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00	4.994.563.635			100,00	734.288.100	100,00	734.288.100	100,00	100,00	100,00	734.288.100	100,00	14,70	
1.00.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00	10.422.856.050			100,00	1.331.447.800	100,00	1.331.447.800	100,00	100,00	100,00	1.331.447.800	100,00	12,77	
1.00.03.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	76,00	601.969.284			44,00	88.500.000	44,00	88.500.000	100,00	100,00	44,00	88.500.000	57,89	14,70	
1.00.04.	Program peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pelayanan informasi publik	1	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100,00	306.086.077			100,00	45.000.000	100,00	45.000.000	100,00	100,00	100,00	45.000.000	100,00	14,70	

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:											
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		1. Indeks kualitas udara	%	76,6					76,6	76,6	100
			2. Indeks Kualitas air		53,64					53,64	53,64	100
			3. Indeks tutupan lahan		86,93					86,93	86,93	100
	Sasaran:											
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		1. PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU UDARA	%	12					12	12	100
			2. PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU AIR	%	24					24	24	100
			3. RUANG TERBUKA HIJAU	%	33,70					33,70	33,70	100

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Tahun 2017 dan 2018 nihil, dikarenakan Periode Resntra Dinas Lingkungan Hidup adalah Tahun 2019-2024, sehingga yang dapat dinilai hanya Tahun 2019 saja;
2. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Dinas Lingkungan Hidup yang baru.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2013-2018 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikutnini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan									
IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,844	74,02	74,382	74,741	75,064	75,402	75,89	75,89
S.15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana									
IS.22	Indeks Kualitas Air	53,64	53,80	53,98	54,15	54,20	54,30	54,90	54,90
IS.23	Indeks Kualitas Udara	76,60	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
IS.24	Indeks Kualitas tutupan Lahan	86,93	86,95	86,97	86,99	87,01	87,03	87,05	87,05

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Dinas Lingkungan Hidup sebagai badan perencanaan pembangunan daerah memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2017** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Indeks Tutupan Lahan melebihi target dari 38,68 menjadi 86,93
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan penumpukan sampah masih dielola dengan baik
3. Pesentasepemuhan baku mutu udara dan air di bawah 50% diakibatkan karena para pelaku usaha /kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;

- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan kebutuhan riil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2020

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP**) Tahun 2020 dengan Tema “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**”.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang

		kesempatan kerja	sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target
			2020
1	2	3	4
	Tujuan:		
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	53,98
		Indeks Kualitas Udara	78,00
		Indeks Kualitas tutupan Lahan	86,97
	Sasaran:		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Udara	30,3

		Persentase Pemenuhan Baku Mutu Air	48
		Ruang Terbuka Hijau	34,10

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tahun 2020

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pada pencapaian misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan Hidup. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Penataan dan pengendalian lingkungan hidup
- Program Kebersihan dan Persampahan
- Program konservasi, rehabilitasi lingkungan dan pertamanan

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mengampu urusan lingkungan hidup. Program-program Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	124 ASN	7.337.534.098
	Belanja Langsung (BL)			15.864.841.787
2.05	Lingkungan Hidup			
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	770.966.228
2.05.01.01	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	a. Jumlah Surat Terkirim	940 Surat	307.496.610
		b. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	12 Bulan	-
		c. Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Memperoleh Jasa Perizinan	70 Unit	-
		d. Jumlah Tenaga kontrak	112 Ob	-
2.05.01.02	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	a. Jumlah ATK	2226 Jenis	157.644.618
		b. Jumlah Barang Cetakan	746 Jenis	-
		c. Jumlah Barang Penggandaan	90000 Lembar	-
		d. Jumlah Komponen Instalasi Listrik	4 Jenis	-
		e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan	146 jenis	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		f Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	12 bln	
		g. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman Rapat	2592 ok	
2.05.01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	a. Jumlah Koordinasi dalam Daerah	104 Ok	305.805.000
		b. Jumlah Koordinasi Luar Daerah	152 Ok	-
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	1.442.060.000
2.05.02.01	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	a. Pembangunan pagar kantor	1 paket	252.200.000
		b. Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	3 paket	-
2.05.02.03	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	4 Unit	894.030.000
		b. Jumlah Kendaraan dinas R3 yang diadakan	27 Unit	-
		c. Jumlah Kendaraan dinas R4 yg dipelihara	10 Unit	-
		d. Jumlah Kendaraan dinas R4 yg dipelihara	22 unit	-
2.05.02.04	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	a. Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	9 unit	153.050.000
		b. Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12 Jenis	-
		c. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	86 Unit	-
		d. Jumlah Spanduk / Umbul-Umbul / Bendera yang disediakan	63 Jenis	-
2.05.02.07	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian kerja lapangan	315 orang	142.780.000
2.05.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	92.800.000
2.05.03.01	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	16 ASN	92.800.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.05.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100%	47.241.500
2.05.04.01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 Dok	15.450.000
2.05.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	4 Dok	13.241.500
2.05.04.03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Pawai Pembangunan dan pameran pembangunan	2 kegiatan	18.550.000
2.05.2.05.15	Program Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidu	a. Persentase pelanggaran lingkungan yang diselesaikan b. Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan	a. 100% b. 11,90%	1.410.672.900
2.05.2.05.15.01	Penaatan dan Pentaatan Lingkungan Hidup;	Sampel Jumlah Sertifikat Uji Air Bersih (Pengaduan)	120 Usaha/Kegiatan	71.212.500
2.05.2.05.15.02	Fasilitasi Pengaduan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan;	Jumlah Sertifikat Uji Air Bersih (Pengaduan)	20 Sampel	413.050.000
		Jumlah Sertifikat Uji Air Limbah (Pengaduan)	16 Sampel	-
		Jumlah Sertifikat Uji Udara Ambien (Pengaduan)	12 Sampel	-
		Jumlah Sosialisasi Pengendalian Polusi dan Pencemaran	14 kecamatan	-
		Jumlah Event Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	2 event	-
2.05.2.05.15.03	Fasilitasi Pengkajian dan Analisis Dampak Lingkungan	Dokumen Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 Dokumen	548.880.400
		Dokumen Pendukung KLHS	1 Dokumen	-
		Jumlah Rekomendasi Ijin Lingkungan	48 Rekomendasi Ijin Lingkungan	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Sertifikat Uji Udara Ambien	52 Sampel	-
		Jumlah Sertifikat Uji air	16 Sampel	-
			47 Jenis	
00 2.05.2.05.15.04	Peningkatan Laboratorium lingkungan	Penyediaan Bahan Kimia Laboratorium	1 paket	337.530.000
		Kalibrasi alat Laboratorium Lingkungan	1 Paket	-
		Penyediaan alat Laboratorium Lingkungan	22%	-
2.05.2.05.16.	Program Kebersihan dan Persampahan	Persentase penurunan timbulan sampah	3 Kecamatan	8.447.828.498
2.05.2.05.16.01	Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;	Pembinaan Pengolahan Sampah di Masyarakat	200 buah	1.988.859.200
		Pembuatan Lubang Biopori untuk penanganan sampah basah	200 batang	-
		Penanaman Pohon di TPA	1 Dokumen	-
		Pengadaan Alat Penunjang Pengolahan Sampah	4 buah	-
		Upah Pekerja Pengelola TPS3R	27 orang	-
2.05.2.05.16.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan			2.569.698.604
2.05.2.05.16.03	Peningkatan Layanan Kebersihan Jalan dan	Perbaikan kesehatan bagi penyapu kebersihan	221 orang	3.889.270.694

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Lingkungan			
		Koordinasi kota sehat Adipura	30 Pekerjaan kerja bakti	-
		Peningkatan pelayanan kebersihan	10 unit armroll	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	1 Unit Buldozer	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	1 Unit Compactor	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	2 Unit Buckhoe	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	2 Unit Tangki Tinja	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	22 Uniit Roda 3	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	6 Unit Dumptruck	-
		Peningkatan pelayanan Persampahan	7 Unit Pickup	-
		Tersediannya data fasilitas dan perbaikan system pelayanan kebersihan	2 Pekerjaan konsultan	-
2.05.2.05.17	Program Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan	a. penghijauan wilayah rawan logsor dan sumber mata air b. Persentase luas RTH perkotaan	a. 5,0 Ha b. 10,80 %	3.653.272.661
2.05.2.05.01.1 7.01.	Penataan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan;	Sekolah adiwiyata tingkat kabupaten	5 Sekolah Adiwiyata	802.022.000
		Bertambahnya area konservasi DAS kali Kemuning	80 %	-
2.05.2.05.01.1 7.02.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan RTH	2 Paket	1.869.735.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau	1 Ha	-
		Peningkatan PSM dalam Pengelolaan RTH	4 Kategori Lomba tingkat SKPD, RT, Kelurahan & Kerajinan Tangan	-
2.05.2.05.01.1 7.03.	Penataan Dekorasi Kota	Tercapainya Pemeliharaan Dekorasi Kota	19 Lokasi	961.515.661
TOTAL				15.864.841.787

Pada Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 23.202.375.885,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 7.337.534.098,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 15.864.841.787,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 24 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan lingkup Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.”**

Hasil evaluasi atas Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 95,00% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah **“Meningkatkan pemabngunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup** Pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan Urusan Unsur Lingkungan Hidup dengan total anggaran Rp. 23.202.375.885,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.337.534.098,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.864.841.787,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 7 program dan 21 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2020, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di

rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI